

MASYARAKAT DESA TERTINGGAL:

*Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya
(Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo)**

*Muhtar dkk.***

ABSTRACT

This study is aimed to identify needs, problems, resources, and programs that conducted by the government. The type and approach study is qualitative-descriptive. Location of the study: Engkangin & Jambu village-West Kalimantan, than, Mlatirejo & Sendangmulyo villages-Central Java. Informants purposively determined: community representatives, community leaders, local communities, and social agency officials of district and provincial level. Data collection techniques: interview, observation, study documentation and group discussion. Field data analyzed qualitatively. The results showed, in the Jambu and Engkangin Village, it is limited, due to limited assets. Meanwhile, for people in the village of Sendangmulyo & Mlatirejo, daily necessities relatively satisfied, because of assets become available. In terms of utilization of local/natural resources in Jambu and Engkangin village, it is still the potential. In terms of program development, in the Jambu & Engkangin village, not undertaken in a sustainable. These programs are still charitatif. Of this realities suggested: Ministry of Social Affairs to make empowerment programs, with adequate assistance as well as control; Relevant government institutions, it is possible to do: Provision of clean water; health and education infrastructure, development/improvement of transport infrastructure, rubber cultivation and freshwater fish (Jambu & Engkangin village), and the use of manure as a bio-gas through the guidance of technology appropriate and the management of banana fruit (Sendangmulyo & Mlatirejo village). The empowerment model needs to be done in a participatory manner; through a series of steps: program planning, formulation of action plans, implementation, evaluation, and termination.

Keywords: Social empowerment, needs, problems, and resources identification.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, sumberdaya, permasalahan, dan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Jenis dan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian Ds. Jambu & Ds. Engkangin-Kalbar serta Desa Sendangmulyo & Ds. Mlatirejo-Jateng. Informan ditentukan secara purposive: perwakilan masyarakat, pemuka masyarakat (formal, informal), dan aparat instansi sosial kabupaten dan provinsi. Teknik pengumpulan data: panduan wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok. Data lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian di Ds. Jambu dan Ds. Engkangin, dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok dapat dikatakan terbatas karena terbatasnya asset. Sementara di Ds. Sendangmulyo dan Mlatirejo, kebutuhan pokok relatif terpenuhi karena tersedianya asset. Dari pemanfaatan sumberdaya (alam) di Ds. Jambu & Ds. Engkangin masih merupakan potensi. Dari sisi program pemberdayaan, di Ds. Jambu & Ds. Engkangin, belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Program tersebut masih bersifat charitatif. Atas realitas itu disarankan: Kementerian Sosial dapat melakukan program pemberdayaan sekurangnya: Pemberdayaan Fakir Miskin dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, disertai pendampingan dan pengendalian yang proporsional; Instansi terkait, dimungkinkan melakukan:

Penyediaan air bersih, prasarana kesehatan, pendidikan, prasarana jalan, budidaya karet dan ikan air tawar (Ds. Jambu & Ds. Engkangin) serta penyuluhan perilaku sehat; Bantuan stimulan ternak (sapi) dan pemanfaatan kotorannya sebagai kompos melalui teknologi tepat guna serta pengelolaan buah pisang (Ds. Sendangmulyo & Mlatirejo). Sementara itu, model pemberdayaan perlu dilakukan secara partisipatif, melalui: asesmen, perencanaan program, formulasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi.

Kata-kata kunci: Pemberdayaan sosial, identifikasi kebutuhan, permasalahan dan sumber daya.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kementerian Sosial R.I. dalam Rencana Strategisnya (2010 - 2014) menegaskan bahwa visi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai salah satu respon, diterbitkan Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 06B/HUK/2010 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lima puluh kabupaten tertinggal sebagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan keadilan di daerah tertinggal.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) tahun 2004 telah melakukan pemetaan ketertinggalan daerah. Hasilnya, teridentifikasi 199 kabupaten tergolong daerah tertinggal di Indonesia. Berdasarkan sebaran wilayahnya, sebanyak 123 kabupaten kategori daerah tertinggal (63%) berada di kawasan Timur Indonesia, 58 kabupaten (28%) berada di Pulau Sumatera, dan 18 kabupaten (8%) berada di Pulau Jawa dan Bali (Bappenas, 2008). Namun demikian, data terkini menunjukkan, terdapat 183 daerah tertinggal. Seharusnya, tinggal 149 desa tertinggal karena pada periode Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 - 2009, sebanyak 50 daerah tertinggal telah keluar dari daftar daerah tertinggal. Akan tetapi, karena ada pemekaran daerah, ternyata terdapat 34 kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) masuk kategori daerah tertinggal (*Media Indonesia*, 20 Mei 2010).

Dari perspektif wilayah, kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: kawasan tertinggal dan kawasan terbelakang (Soetomo, 2006: 277-278). Selanjutnya Soetomo menjelaskan, kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya tetap rendah. Salah satu penyebab utama karena terbatasnya potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan kawasan terbelakang adalah suatu kawasan yang sebetulnya cukup menyimpan potensi dan sumber daya, tetapi belum sempat dikembangkan dan ditangani secara sungguh-sungguh sehingga perkembangan sosial

* Tulisan ini disarikan dari hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal: Identifikasi Kebutuhan, Permasalahan, dan Sumberdaya (di Desa Jambu, Engkangin, Desa Sendangmulyo & Mlatirejo) yang dibiayai oleh dana hibah RISTEK (2010).

** Tim peneliti: Muchtar, Sutaat, Achmadi JP, Ahmad Suhendi, dan Suyanto.

ekonomi masyarakatnya rendah dan mayoritas berada dalam kondisi kemiskinan.

Menurut Owens dan Saw (1997) dalam Soetomo (2006: 278-281), ada dua pandangan untuk menangani daerah tertinggal, *pertama*: pandangan yang dilandasi pertimbangan dan perhitungan ekonomis, yang menyarankan agar investasi dipusatkan pada wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi dengan alasan lebih cepat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan *Gross National Product* (GNP). *Ke-dua*: didasari pada pertimbangan sosial-politik, yang merekomendasikan demi keadilan, investasi dilakukan tidak hanya untuk daerah yang berpotensi tinggi tetapi juga di daerah berpotensi sedang dan rendah. Sementara itu, bagi upaya pengembangan kawasan terbelakang dimana mayoritas penduduknya dalam kondisi kemiskinan karena belum banyak upaya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada, maka strategi pengembangan kawasan ini adalah dengan cara meningkatkan pendayagunaan potensi dan sumber yang ada baik melalui investasi bagi eksploitasi dan eksplorasi sumber daya maupun investasi bagi pembangunan sarana prasarana pendukungnya, pada dasarnya dibedakan menjadi dua: *pertama*, pendayagunaan potensi yang belum dilakukan; *kedua*, optimalisasi potensi yang sebelumnya telah dilakukan.

Persoalan penduduk di daerah tertinggal bukan hanya persoalan lokal, akan tetapi merupakan persoalan bersama (nasional). Oleh karenanya, perlu perhatian berbagai pihak terkait - Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memberdayakan dan mengembangkannya. Melalui upaya tersebut diharapkan secara bertahap masyarakat daerah tertinggal terentah dari ketertinggalannya. Dalam kerangka itu, identifikasi kebutuhan, sumberdaya, dan permasalahan masyarakat daerah tertinggal penting dilakukan.

1.2 Permasalahan

Setidaknya terdapat enam indikator sebagai permasalahan mendasar ketertinggalan daerah, yakni: persoalan perekonomian (kemiskinan penduduk), sumber daya manusia yang rendah, prasarana/infrastruktur, kemampuan/kekuatan keuangan daerah yang terbatas, aksesibilitas untuk mencapai pusat-pusat pelayanan dasar yang minim, serta karakteristik daerah yang rawan konflik sosial dan bencana alam.

Dalam konteks penelitian ini, Kabupaten Rembang, dimana terdapat 314 desa, 55 desa termasuk kategori sangat tertinggal dan 165 desa masuk kategori tertinggal (Keputusan Bupati Rembang, 2006). Sementara itu, di Kabupaten Landak terdapat 10 kecamatan, 174 desa/kelurahan. Sebagai daerah pengembangan (baru), desa-desa di wilayah ini pada umumnya dalam kategori tertinggal.

Atas permasalahan itu, pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa saja kebutuhan, permasalahan, dan sumberdaya/*asset* yang tersedia di daerah tertinggal?;
- b. Program pembangunan apa saja yang pernah dilaksanakan?;
- c. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Teridentifikasinya kebutuhan, permasalahan, dan sumberdaya/*asset* masyarakat daerah tertinggal;
- b. Teridentifikasinya program pembangunan yang pernah dilaksanakan;
- c. Tersusunnya model pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal.

Manfaat penelitian ini, secara praktis, diharapkan dapat menjadi *input* penyusunan program khususnya direktorat terkait Kementerian Sosial R.I. (Kemensos), dan

umumnya bagi instansi pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan masyarakat. Sedangkan secara akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi titik masuk bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam dalam upaya memberdayakan/mengembangkan masyarakat daerah tertinggal.

1.4. Kajian teori

a. Kebutuhan masyarakat

Goodin (1990) dalam Adi (2008: 325-327) menjelaskan bahwa kebutuhan tidaklah selalu absolut. Ia berpandangan bahwa kebutuhan mempunyai dua komponen yang saling berpengaruh, yakni kebutuhan prioritas dan kebutuhan kerelatifan. Terkait kebutuhan prioritas, pihak yang memiliki otoritas (*authority*) seringkali harus mengarahkan bila terjadi konflik antara memuaskan keinginan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bila hal itu terjadi, *community worker* harus sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bukannya keinginan masyarakat. Ia menyontohkan, *community worker* harus mengkaji dengan seksama masukan dari komunitas petani di suatu daerah yang menyatakan, mereka membutuhkan fasilitas MCK sebagai upaya mengatasi kemiskinan yang ada di daerahnya, ataukah sebaiknya memusatkan perhatian pada perbaikan sarana irigasi, bibit, dan penyuluhan penggunaan bibit unggul?. Selanjutnya, Goodin melihat, kebutuhan seringkali lebih bersifat relatif daripada absolut. Pihak yang meyakini bahwa kebutuhan itu bersifat absolut melihat bahwa kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) merupakan kebutuhan yang absolut. Goodin melihat bahwa kebutuhan itu bersifat relatif dan sangat tergantung dengan unsur waktu, tempat, dan lingkungan sosial. Ia menyontohkan, kebutuhan akan pakaian pada tempat yang berbeda akan berbeda pula kebutuhannya.

Atas dasar itu, perlu diperhatikan, untuk selalu memperbarui atau mengkaji ulang kebutuhan suatu komunitas karena dengan berjalannya waktu dan perubahan lingkungan sosial (ekonomi), kebutuhan suatu kelompok masyarakat menjadi berubah.

Bradshaw (1972) dalam Kettner (1990), Ife (2002), dan Adi (2008: 328-330) menjelaskan kebutuhan dalam empat kategori, yaitu: (1) kebutuhan normatif, yaitu kebutuhan yang didefinisikan oleh mereka (sekelompok) orang yang memiliki otoritas dan disesuaikan dengan standar ataupun norma yang ada, misalnya, garis kemiskinan; (2) kebutuhan yang dipersepsikan (*perceived need*) atau dikenal juga kebutuhan yang dirasakan (*felt need*), merupakan kebutuhan yang dipikirkan harus mereka dapatkan ataupun kebutuhan yang dirasakan oleh komunitas sasaran; (3) kebutuhan yang diekspresikan (*expressed need*), merupakan kebutuhan yang diungkapkan oleh komunitas sasaran dan mencari berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut; (4) kebutuhan relatif (*relative need*), lebih terfokus pada kesenjangan antara jenis layanan yang diberikan pada satu komunitas dengan komunitas di area yang berbeda.

Kategorisasi kebutuhan masyarakat tersebut dapat saling melengkapi dan membantu untuk memahami kebutuhan masyarakat daerah tertinggal.

b. Sumberdaya

Menurut Adi (2008: 285), komunitas di tingkat lokal dalam perjalanan waktu telah mengembangkan suatu aset yang menjadi sumber daya ataupun potensi bagi komunitas tersebut guna menghadapi perubahan yang terjadi. Terkait itu, Adi (2008: 286-3008) mengembagkan enam aset berdasarkan pemikiran Green dan Haines (2002) yang menyoroti lima aset dalam komunitas. Keenam aset tersebut adalah:

1. Modal fisik (*physical capital*), terdiri dari dua kelompok utama yaitu bangunan dan infrastruktur;
2. Modal finansial (*financial capital*), adalah dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas tersebut;
3. Modal lingkungan (*environmental capital*), berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta mempunyai nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga nyaman hidup;
4. Modal teknologi (*technological capital*), terkait dengan ketersediaan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat, dan bukan sekedar teknologi digital yang canggih, akan tetapi belum tentu bermanfaat bagi masyarakat tersebut;
5. Modal manusia (*human capital*), sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik itu teknologi yang sederhana maupun teknologi yang canggih;
6. Modal sosial (*social capital*), adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada didalamnya, dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Sementara itu, Seragaldin dan Grottaert (1999) menjelaskan, *social capital generally refers to the set of norm, networks, and organization through which people gain access to power and resources that are instrumental in enabling decision making and policy formulation*. Fukuyama (2000) merumuskan *social capital* sebagai seperangkat ringkas nilai-nilai internal atau norma-norma yang disebarkan diantara anggota-anggota suatu kelompok yang mengizinkan mereka untuk bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Ia menambahkan, prasyarat penting dalam

social capital adalah kepercayaan (*trust*), kejujuran (*honesty*), dan timbal balik (*reciprocity*). Sedangkan World Bank (1999), *social capital refers to institutions, relationship and norms that shape the quality of society's interaction*.

c. Daerah tertinggal

Daerah tertinggal adalah sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Saifullah, 2006). Terkait itu, menurut pihak Bappenas (2006), suatu daerah dikategorikan tertinggal, karena: (a) secara geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi; (b) dari sisi sumber daya alam, tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; (c) dari sisi sumber daya manusia, umumnya masyarakat di daerah tertinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang; (d) keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (e) seringnya (suatu daerah) mengalami bencana alam dan konflik sosial yang berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; dan (f) suatu daerah menjadi tertinggal, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat, seperti: kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

Bappenas menjelaskan (2006), pembangunan daerah tertinggal perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Setidaknya dapat dilakukan melalui strategi: (a) **pengembangan ekonomi lokal**, yang diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumber daya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada; (b) **pemberdayaan masyarakat**, yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik; (c) **perluasan kesempatan**, strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju; (d) **peningkatan kapasitas**, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal; dan (e) **peningkatan mitigasi, rehabilitasi**, strategi ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan.

Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial-budaya. Dalam konteks demikian, pengembangan aspek sosial-budaya lokal masyarakat daerah tertinggal perlu mendapat perhatian secara proporsional dari pemangku kepentingan sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Sering terjadi dan banyak contoh, pengembangan aspek sosial-budaya menjadi pemicu perkembangan aspek ekonomi suatu masyarakat. dalam kerangka demikian, pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal menjadi prioritas pilihan.

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Terkait itu, Payne (1997:266) mengemukakan, pada prinsipnya pemberdayaan ditujukan untuk: *“to help client gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal block to exercising existing power by increasing and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to client”*. Sementara itu, menurut Zastrow (2008: 412), *empowerment as the process of helping individuals, families, groups, and communities increase their personal, interpersonal, socio-economic, and political strength and influence toward improving their circumstances.*

Friedmann (1992) dalam Pranarka & Moeljarto (1996, h. 61-62), menempatkan rumah tangga sebagai basis utama pemberdayaan, yaitu sebagai kekuatan sosial, politik, dan psikologis. Menurutnya, kekuatan sosial menyangkut kemampuan rumah tangga dalam mengakses dasar-dasar produksi, meliputi informasi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber keuangan. Apabila ekonomi rumah tangga itu meningkatkan aksesnya pada dasar-dasar produksi, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat. Sedangkan kekuatan politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi masa depannya. Kekuatan politik tidak hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga merupakan kekuatan untuk menjadi vokal dan bertindak secara kolektif. Selanjutnya, rumah tangga juga mengandalkan kekuatan psikologis berupa potensi individu (*individual sense of potency*) yang menunjukkan perilaku percaya diri. Rasa potensi pribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif terhadap

perjuangan rumah tangga yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya.

Kartasasmita (1996:145) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Sementara itu, Sumodingrat (2009) memaknai pemberdayaan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki & tersedia dilingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dari pelbagai konsep pemberdayaan menurut para ahli tersebut, pada prinsipnya pemberdayaan dapat difahami sebagai upaya mendorong kemampuan warga lokal dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, dimana pihak luar (pemerintah dan pihak lainnya) hanya berfungsi sebagai fasilitasi.

1.5 Metode penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini deskriptif-kualitatif, yang berupaya menggambarkan kondisi obyektif kehidupan masyarakat tertinggal: kebutuhan pokok, *asset* yang tersedia, dan program pembangunan yang pernah dilaksanakan oleh berbagai pihak. Dalam kerangka percepatan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, Kementerian sosial R.I. dalam kurun waktu 2010-2014 mengagendakan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal, diantaranya adalah Kabupaten Landak-Kalimantan Barat dan Kabupaten Rembang-Jawa Tengah. Atas dasar itu, kedua lokasi tersebut di pilih, dimana pada masing-masing daerah tersebut ditentukan dua desa tertinggal di satu wilayah kecamatan.

Informan ditentukan secara *purposive*. Atas dasar itu, informan penelitian adalah: (1) pemuka masyarakat (formal, non formal) setempat; (2) aparat instansi terkait (provinsi, kabupaten) setempat; dan (3) perwakilan keluarga fakir miskin dan miskin, untuk mengetahui kebutuhan dan masalah mereka.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

- a. Wawancara dengan warga masyarakat (miskin) daerah tertinggal, dan pejabat instansi terkait (provinsi, kabupaten).
- b. Observasi, untuk mengetahui secara langsung kondisi kehidupan masyarakat daerah tertinggal.
- c. Studi dokumentasi, untuk melengkapi data primer (wawancara dan observasi).
- d. Diskusi kelompok dengan pemuka masyarakat (formal, informal) guna memperkaya data dan informasi yang telah diperoleh.

Data yang telah terkumpul, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan: reduksi data, *display* data, dan pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

II. HASIL PENELITIAN

2.1 Gambaran lokasi penelitian

2.1.1 Kabupaten Landak

Kabupaten Landak yang merupakan pemekaran Kabupaten Pontianak dengan ibukota Ngabang yang luas wilayahnya 9.909.10 km² ini terbentuk tahun 1999. Batas wilayahnya: pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pontianak dan Sanggau, dan pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pontianak.

Secara demografis, Kabupaten Landak berpenduduk 282.026 jiwa dengan kepadatan

28 jiwa/km² (Sensus penduduk, 2000). Secara administratif Kabupaten Landak terdiri dari 10 kecamatan, 156 desa, 26 desa diantaranya termasuk tertinggal (Anonim; 2001). Berdasarkan catatan sejarah, di Kabupaten Landak tepatnya di Kecamatan Mandor terdapat monumen dimana dimakamkan sekitar 21.037 penduduk akibat kekejaman tentara Jepang. Saat ini tempat tersebut dikenal sebagai Taman Makam Pejuang Mandor dan menjadi wisata sejarah.

Sektor pertanian merupakan mata pencarian utama penduduk (89%). Hasil pertanian menyumbang perekonomian daerah sebesar (Rp 730,6 miliar/37%) dan sektor kehutanan sebesar Rp 134,6 miliar (21,4%) dari pendapatan daerah. Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah menyiapkan sekitar 300.000 hektar lahan perkebunan. Hal itu dilakukan melihat prospek sektor perdagangan karet dan minyak kelapa sawit yang kondusif dari penyediaan lahan dan penyerapan lapangan kerja. Terutama minyak kelapa sawit yang menjadi andalan perdagangan ke Pontianak dan bahkan ekspor ke Malaysia. Namun demikian produk tersebut diperoleh dari perkebunan rakyat karena perkebunan berskala besar masih terbatas (Syaifullah, 2004: 505–507).

Dapat ditambahkan bahwa sekitar 30% wilayah Kabupaten Landak adalah hutan. Namun demikian, dalam perkembangannya, banyak terjadi *illegal logging* misalnya di Kecamatan Mandor dan di Kecamatan Air Besar. Sedangkan pertambangan emas tanpa ijin (PETI) terjadi di sekitar Sungai Behe (Kecamatan Kuala Behe), Sungai Belantik dan Sungai Landak.

Sasaran studi yang diidentifikasi sebagai desa tertinggal, dikemukakan sebagai berikut:

a. Desa Jambu

Desa Jambu, yang secara definitif ada sejak tahun 1998 ini, merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Air Besar, dimana desa-

desa di wilayah Kecamatan Air Besar, umumnya masuk kategori tertinggal. Secara geografis, lokasinya jauh dari ibukota Kabupaten Landak (sekitar 200 Km). Secara spesifik, Desa Jambu terletak di daerah aliran sungai (DAS) Sekayau yang menyatu dengan Sungai Ngabang, dimana hilirnya (di bagian utara) melintasi beberapa desa hingga ibukota Kabupaten Landak. Desa ini terbagi atas dua dusun, yaitu: Dusun Jambu Pokok dan Dusun Jambu Tembawang. Batas-batasnya: sebelah utara berbatasan dengan Desa Dange, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sepele, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Serimbu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Engkangin.

Menuju Desa Jambu, dari arah Desa Serimbu yang merupakan ibukota Kecamatan Air Besar, dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu: (a) jalur darat, dengan cara berjalan kaki, yang ditempuh sekitar satu jam, atau menggunakan sepeda motor, yang ditempuh selama 15-25 menit; (b) menggunakan perahu motor menyusuri aliran sungai yang ditempuh sekitar satu jam-an. Untuk berinteraksi dengan warga masyarakat di sekitarnya, dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, warga Desa Jambu melakukannya dengan cara jalan kaki. Karena ongkos ojek sekitar Rp 20.000,-/sekali jalan. Sarana publik untuk jalur transportasi sungai (perahu), belum tersedia. Alat transportasi tersebut hanya dimiliki beberapa orang warga saja, sebagai alat angkut hasil hutan (karet dan kelapa sawit). Namun demikian, dalam kondisi tertentu, perahu tersebut dapat disewa warga baik untuk angkutan barang maupun orang, dengan biaya sewa sekitar Rp 200.000,-/sekali jalan.

Lingkungan alam Desa Jambu tergolong asri. Karena kehidupan masyarakat umumnya bergantung pada hutan, dimana baru sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk perkebunan karet dan sawit. Sementara itu, sungai, baru dimanfaatkan untuk alternatif sarana hubungan, dan mencari ikan (memancing, perangkap ikan).

Terkait kehidupan masyarakatnya yang agraris, jenis tanaman penduduk antara lain: padi (untuk konsumsi sendiri), kacang, cabai, tomat. Disamping itu, sebagian warga juga menanam tebu dan buah-buahan.

Penduduk Desa Jambu berjumlah: 1.012 jiwa (laki-laki 604 jiwa/59,68 %, dan perempuan 508 jiwa/40,32 %). Mayoritas warga Desa Jambu adalah etnis Dayak Bengkayan (etnis Kendayan sebagai induknya). Tingkat pendidikan warga Desa Jambu dapat dikatakan rendah, hal itu terlihat pada data yang menunjukkan, bahwa yang tidak sekolah sekitar 40 %, SD tidak tamat (40 %), tamat SD dan SMP (15 %), dan tamat SMA (5 %). Hanya sebagian kecil warga yang melanjutkan sekolah SMP, SMA dan ke Perguruan Tinggi.

Warga Desa Jambu umumnya menganut agama Nasrani (Katolik 45 KK, Protestan 44 KK) dan telah tersedia dua buah gereja. Tiap ibadah rutin dan acara ritual tertentu (kematian, misalnya) mereka dibimbing/dilayani oleh pendeta, dimana pendeta tersebut datang saat ibadat mingguan dan saat kematian.

b. Desa Engkangin

Seperti Desa Jambu, Desa Engkangin juga merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Air Besar. Desa Engkangin yang juga terletak di DAS ini, terbagi dalam dua dusun, yakni Dusun Engkangin dan Dusun Tauk. Batas-batas dengan lingkungan sekitarnya: Desa Dange Aje di sebelah utara, Desa Sakendal di sebelah selatan, Desa Serimbu di sebelah barat, dan dengan Desa Merayuh di sebelah timur. Rumah penduduk umumnya berbentuk panggung yang merupakan tradisi rumah etnis Dayak (Kalimantan) yang dibuat dari bahan-bahan yang ada di lingkungan pemukiman mereka (hutan), seperti: kayu, bambu, dan atap rumbia. Namun demikian, juga sudah banyak rumah penduduk yang menggunakan bahan seng. Terdapat kondisi yang cukup kontras dalam kehidupan masyarakat Desa Engkangin, yaitu

sudah terdapat antena parabola, guna mengakses siaran televisi. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi melalui telepon belum ada jaringan. Kondisi jalan (darat) menuju Desa Engkangin rusak/berkubang.

Alternatif lain, untuk menuju desa tersebut, melalui jalur sungai, dengan menggunakan perahu atau "*pepet*" istilah setempat. Namun demikian, jalur sungai ini juga belum cukup aman karena di bagian sungai tertentu terdapat arus yang cukup deras. Penduduk Desa Engkangin (2010) berjumlah 1.209 jiwa/307 KK (666 laki-laki dan 543 perempuan). Mata pencaharian penduduk, umumnya, bertani padi (ladang, sawah), dan berkebun karet.

Warga Desa Engkangin umumnya memeluk agama Kristen, dan telah tersedia gereja, empat buah untuk Kristen Protestan dan dua buah untuk Kristen Katolik. Keamanan desa "sangat" sehingga karenanya tidak ada siskamling yang dilakukan warga. Sebagai gambaran, warga tidak khawatir memarkir kendaraan (motor) di luar rumah/halaman rumah walaupun pada malam hari.

Solidaritas warga Desa Engkangin cukup baik, hal itu terlihat, jika ada warga yang sakit atau meninggal, umumnya warga lain memberikan bantuan guna meringankan beban keluarga yang terkena musibah tersebut. Demikian halnya ketika ada warga yang sedang hajatan, warga lain secara berbondong akan mengunjungi keluarga yang sedang hajatan tersebut dengan membawa bawaan sebagaimana kebiasaan warga setempat. Selain itu, ada upacara pesta panen atau biasa disebut *naik dangau*. Ketika dilaksanakan acara ini, umumnya warga terutama laki-laki berpesta pora dengan makan dan minum-minuman (beralkohol yang dibuat secara tradisional).

2.1.2 Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang dengan luas 101,408 hektar dan jumlah penduduk 591.786 jiwa,

dimana 35,62% (208.536 jiwa) dalam kategori miskin ini merupakan salah satu wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak di ujung timur laut dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura). Secara umum, kondisi wilayah Kabupaten Rembang berdataran rendah dengan ketinggian maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang, sebelah utara: Laut Jawa, sebelah timur: Kabupaten Tuban-Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan: Kabupaten Blora, dan sebelah barat: Kabupaten Pati.

Secara administratif, Kabupaten Rembang memiliki 14 kecamatan (287 desa, 7 kelurahan), dimana 6 kecamatan (Sumber, Sedan, Gunem, Sluke, Sarang Bulu) termasuk kategori sangat tertinggal, 7 kecamatan (Pancur, Sulang, Sale, Kaliorejo, Kragan, Lasem, Pamotan) dalam kategori tertinggal, dan 1 kecamatan (Rembang) kategori tertinggal (Strada DT, 2007-2009). Berdasarkan data tersebut, Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo yang berada di wilayah Kecamatan Bulu, termasuk kategori desa sangat tertinggal, yang oleh karenanya menjadi *sample* penelitian ini.

Namun demikian, sejak tahun 2010 Kabupaten Rembang dinyatakan bebas dari kategori desa tertinggal. Hal itu terkait dengan visi Kabupaten Rembang 2006-2010, yakni "Terwujudnya Rembang Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan Kawasan". Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan empat pilar program strategis pembangunan Kabupaten Rembang, yaitu: penyediaan dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik, sekolah gratis dan bermutu, jaminan kesehatan Rembang Sehat (JKRS), dan pengembangan ekonomi Rembang (PER) (Bangkit, 2010).

Secara lebih jelas, gambaran kedua lokasi *sample* penelitian di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tersebut dikemukakan berikut:

a. Desa Sendangmulyo

Secara geografis, Desa Sendangmulyo yang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bulu ini berbatasan langsung dengan Hutan Jati (Perhutani) pada bagian selatan, Desa Pondokrejo pada bagian utara, Desa Warugunung dan Desa Pinggan pada bagian timur, dan Desa Mlatirejo pada bagian barat. Luas wilayah desa ini 884,24 hektar, dimana 254,14 hektar berupa tanah sawah dan 630,10 hektar berupa tanah kering. Dalam kondisi demikian, Desa Sendangmulyo termasuk terluas kedua di wilayah Kecamatan Bulu setelah Desa Pasedan. Jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Bulu 17 Km (Bulu dalam Angka, 2008), sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Rembang 24 Km (Podes Sendangmulyo, 2008). Dari dan ke desa tersebut telah tersedia angkutan umum (Angdes). Saat ini, penduduk Desa Sendangmulyo berjumlah 1.470 KK/4.412 jiwa (laki-laki: 2.198 jiwa, perempuan: 2.214 jiwa). Mereka tersebar di 25 rukun tetangga (RT), yaitu: 8 RT di Rukun Warga (RW) I/Dukuh Krajan, 6 RT di RW II/Dukuh Kidulan, 6 RT di RW III/Dukuh Galgrijo, dan 6 RT di RW IV/Dukuh Punggul (Podes Sendangmulyo, 2008).

Warga Desa Sendangmulyo dapat dikatakan homogen dari sisi etnis (Jawa), dan dari sisi agama, yaitu Islam. Organisasi kemasyarakatan/keagamaan di desa ini antara lain: PKK, Karang Taruna, kelompok Tani, Organisasi Muslimat/Fatayat. Namun demikian, warga desa ini secara turun temurun masih meyakini apa yang mereka sebut sebagai "*Resik Deso*" (Bersih Desa) yang dilakukan secara rutin pada bulan Madilakir (Jumadil Akhir) dengan mengadakan kesenian *Tayub*. Jika tradisi itu ditinggalkan, akan terjadi marabahaya didesa tersebut. Selanjutnya, di desa tersebut juga terdapat pranata sosial berupa nilai-nilai yang tetap lestari di masyarakat hingga saat ini, yakni: *sambatan* ketika mengerjakan lahan pertanian mengerjakan rumah dan kerjabhakti/gotong royong kebersihan lingkungan.

b. Desa Mlatirejo

Desa Mlatirejo juga merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Luasnya 383,10 Ha, dimana 85,55 hektar berupa tanah sawah dan 297,55 hektar berupa tanah kering. Sebagian besar wilayah desa ini adalah pertanian, perkebunan, dan hutan (milik perhutani). Sebagian besar wilayah desa ini adalah pertanian, perkebunan, dan hutan (milik perhutani). Hasil utamanya adalah: padi, kedelai, jagung, tebu, dan hasil kebun berupa pisang dan buah-buahan, terutama mangga. Buah mangga di desa ini cukup besar, namun demikian, belum cukup mendapat perhatian dalam hal pemasarannya, sehingga terjadi transaksi “*ijon*” dengan para *tengkulak* yang tentunya dengan harga yang lebih murah. Terkait kebutuhan pertanian, yakni irigasi, dapat dikatakan belum cukup memadai, dimana sebagian besar sawah, mengandalkan hujan (*tadah hujan*). Oleh karena itu untuk jenis tanaman padi hanya ada satu musim tanam, yakni pada saat musim hujan.

Dari sisi transportasi, desa ini telah terhubung dengan desa disekitarnya, dengan jalan aspal, namun dalam kondisi kurang baik. Transportasi utama penduduk desa ini, baik antar desa maupun ke kecamatan menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda empat (*pick up* terbuka yang sifatnya insidental). Untuk mendapatkan kendaraan umum antar kecamatan harus berjalan kaki sekitar 5 km dari pusat desa ke jalan antar kecamatan. Jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Bulu 18 Km (Bulu dalam Angka, 2008), sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Rembang 35 Km (Podes Mlatirejo, 2008), telah tersedia angkutan umum dari dan ke desa tersebut baik dari ibu kota kabupaten maupun kecamatan. Batas Desa Mlatirejo dengan lingkungan sekitarnya, pada bagian selatan berbatasan langsung dengan hutan lindung (hutan Jati), pada bagian utara berbatasan dengan Desa Pelemsari, pada bagian timur berbatasan dengan Desa Sendangmulyo, dan pada bagian barat berbatasan dengan Desa Loh Gede.

Desa Mlatirejo berpenduduk 314 KK/939 jiwa (laki-laki: 460 jiwa, perempuan: 479 jiwa). Mereka tersebar di sembilan rukun tetangga (RT), yakni empat RT di Rukun Warga (RW) I/Dukuh Malat, dan lima RT di RW II/Dukuh Balong (Podes Mlatirejo, 2008). Seperti di Desa Sendangmulyo, warga Desa Mlatirejo juga homogen dari sisi etnis, yakni suku Jawa (100%) dan memeluk agama Islam dari sisi religi. Oleh karenanya, di desa ini terdapat lembaga keagamaan Islam, yakni: Jamaah Putra dan Jamaah Perempuan (Muslimat, Fatayat), dan Pemuda Masjid. Namun demikian, warga desa ini secara turun temurun masih meyakini apa yang mereka sebut sebagai “*Resik Deso*” (Bersih Desa) yang dilakukan secara rutin pada bulan Rejeb (Rojab) dengan mengadakan kesenian Ketoprak. Jika tradisi itu ditinggalkan, akan terjadi marabahaya di desa tersebut. Di desa ini juga terdapat Organisasi Perempuan (PKK), dan Kelompok Tani. Disamping itu juga terdapat pranata sosial berupa nilai-nilai yang tetap terpelihara dengan baik di masyarakat hingga saat ini, yakni: *sambatan* sewaktu mengerjakan ladang/pertanian dan membangun rumah, serta gotong-royong/kerjabhakti ketika membersihkan lingkungan, sebagaimana halnya terjadi di Desa Sendangmulyo.

2.2 Kebutuhan, permasalahan, dan sumberdaya/asset

2.2.1 Kualitas hidup masyarakat

Kualitas hidup masyarakat di empat desa lokasi penelitian dapat dicermati pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka dan permasalahan (kesejahteraan) sosial yang muncul. Hal-hal tersebut dikemukakan berikut:

a. Kebutuhan

Berdasarkan temuan lapangan, Desa Jambu dan Desa Engkangin di wilayah Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal, dari sisi ketersediaan

sarana prasarana: infrastruktur (alan) yang masih minim termasuk sarana komunikasi dan transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbatas, dimana hal ini berkorelasi dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM) (Bappenas, 2006).

Kondisi tersebut, juga berhubungan dengan *asset* yang tersedia/dimiliki oleh kedua desa tersebut, yakni modal fisik (bangunan), finansial, sumberdaya manusia (SDM), dan teknologi yang juga terbatas adanya. Namun demikian, dari sisi modal lingkungan (khususnya alam) sekitar dan modal sosial masih cukup memberikan harapan bagi berkembangnya ke dua desa tersebut.

Di sisi Lain, secara geografis, dua desa yang berada di tepian Sungai Landak tersebut, potensial dikembangkan, baik untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Lahan pertanian baik untuk pertanian maupun perkebunan masih terbentang luas, sementara itu, sungai yang ada baru dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan sarana sosial lainnya, dan belum dimanfaatkan secara ekonomi.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur: jalan, pendidikan, kesehatan di kedua desa merupakan kebutuhan fisik desa yang memerlukan perhatian dari pihak (instansi pemerintah bidang fisik) terkait. Terkait itu, program pemberdayaan sosial (dari instansi pemerintah lingkup kesejahteraan rakyat) menjadi penting untuk dilakukan dan disinergikan terhadap program pembangunan infrastruktur tersebut dalam kerangka pengembangan kedua desa tersebut.

Adapun Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo di wilayah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, sebenarnya (sudah) tidak lagi dikategorikan sebagai desa tertinggal (terbelakang), karena dari sisi infrastruktur, seperti: jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi dapat dikatakan relatif tersedia (memadai). Dari sisi *asset*, yakni modal fisik, lingkungan, dan sosial yang relatif tersedia, kecuali modal sumberdaya manusia (SDM), teknologi, dan finansial yang masih perlu ditingkatkan.

Secara geografis, kedua desa tersebut berbatasan langsung dengan hutan lindung (Jati), dan merupakan desa penghasil: jagung, padi, buah pisang, dan buah mangga. Buah pisang dan buah mangga, ketika musim panen sangat melimpah, yang terjadi kemudian harga komoditas tersebut jatuh. Disamping sebagai petani, pada umumnya warga juga beternak sapi.

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan buah pisang dan buah mangga melalui teknologi tepat guna, agar menjadi tahan lama, dan mempunyai nilai ekonomi yang wajar. Terkait kotoran ternak sapi warga, dimungkinkan pengelolaan melalui teknologi (tepat guna) menjadi Bio Gas sebagai sumber energi untuk masak.

b. Permasalahan

Permasalahan sosial menonjol di empat desa lokasi penelitian adalah masalah kemiskinan penduduk. Implikasinya, banyak permasalahan kesejahteraan sosial muncul, sebagaimana terlihat pada data berikut:

Tabel 1: Data PMKS di Desa Jambu & Engkangin

| NO | JENIS PMKS | Desa | |
|----|---------------------------------|----------|-----------|
| | | Jambu | Engkangin |
| 1 | Fakir Miskin | 120 KK | 277 |
| 2 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 50 Orang | - |
| 3 | Anak Putus Sekolah | 21 Orang | - |
| 4 | Penyandang Cacat | 16 Orang | 11 |
| 5 | Lanjut Usia Terlantar | 14 orang | 12 |
| 6 | Keluarga rumah tidak layak huni | - | 150 |

Sumber: Hasil penelitian, 2010.

Tabel 2: Data PMKS Desa Sendangmulyo & Desa Mlatirejo

| NO | JENIS PMKS | Desa | | Ket |
|----|---------------------------------|--------------|-----------|---|
| | | Sendangmulyo | Mlatirejo | |
| 1 | Fakir Miskin | 250 | 184 | *) Satu anak menderitahidrocephalus (pembesaran kepala) |
| 2 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | - | 18 | |
| 3 | Penyandang Cacat | 28 | 13 | |
| 4 | Lanjut Usia Terlantar | - | 63 | |
| 5 | Keluarga rumah tidak layak huni | - | 42 | |
| 6 | Balita Terlantar | 10 | 8*) | |
| 7 | Warga dipasung (Stress) | 2 | - | |

Sumber: Hasil penelitian, 2010.

Sehubungan dengan itu, berbagai *asset* sebagai sumberdaya atau potensi perlu dioptimalkan pemanfaatannya, dimungkinkan intervensi dari pihak luar dalam kerangka penanganan permasalahan kemiskinan penduduk khususnya dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial umumnya. Dalam upaya penanganan PMKS, dimungkinkan intervensi dari pihak luar khususnya Kementerian Sosial baik yang bersifat bantuan sosial bagi kelompok rentan maupun pemberdayaan sebagai upaya pengembangan warga yang *powerless*.

2.2.2 *Asset* komunitas

Dari sisi *asset* komunitas, yaitu: fisik, finansial, sumberdaya manusia, lingkungan, dan teknologi (Adi, 2008) sebagai sumber daya atau potensi, pada Desa Jambu dan Desa Engkangin di wilayah Kecamatan Air Besar (Landak, Kalimantan Barat), dapat dikatakan relatif terbatas, kecuali modal lingkungan (alam) yang terbentang luas sebagai lahan pertanian maupun perkebunan, dan modal sosial yang (tetap) terpelihara dengan baik. Sementara itu, terhadap *asset* fisik, finansial, sumberdaya manusia, dan teknologi perlu intervensi dari pihak luar khususnya pemerintah.

Adapun Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo di wilayah Kecamatan Bulu (Rembang, Jawa Tengah), dari sisi *asset* yaitu: fisik dan sosial (Adi, 2008) sebagai sumber daya atau potensi dapat dinyatakan cukup tersedia.

Oleh karena itu, yang diperlukan adalah optimalisasi *asset* tersebut dalam kerangka pemberdayaan masyarakat di kedua desa tersebut. Secara khusus, dimungkinkan perlu pendampingan ketika hutan lindung (Jati) mulai masa panen, karena telah ada *MoU* antara pihak Perhutani dengan masyarakat di kedua desa tersebut dimana mereka tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bahwa 2% hasil hutan Jati tersebut akan diserahkan warga melalui LMDH.

2.3 Program pembangunan yang dilaksanakan

Kenyataan empirik menunjukkan, program pembangunan, khususnya oleh pemerintah, sudah banyak dilakukan, baik di Desa Jambu dan Engkangin di Wilayah Kecamatan Air Besar (Landak, Kalimantan Barat) maupun Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo di Wilayah Kecamatan Bulu (Rembang, Jawa Tengah). Program pembangunan tersebut antara lain: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk membangun infrastruktur desa, yaitu: penyaluran air ke rumah-rumah warga dan pembangunan talud/tanggul jalan di Desa Mlatirejo, dan pengaspalan jalan dan pembangunan talud/tanggul jalan di Desa Sendangmulyo. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin (di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo, dan Mlatirejo), Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di empat desa tersebut, *Electricity* melalui PLN

di Desa Engkangin, Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo. Pembangunan “Tuk/Dam” yang diperuntukan bagi pengairan sawah warga khususnya Desa Sendangmulyo. Pembangunan Madrasah Diniyah, dan Pembangunan Gedung Pendidikan usia Dini (PAUD) khususnya di Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo.

2.4 Konsep model pemberdayaan berbasis aset komunitas

Meskipun telah banyak dilakukan intervensi (melalui program pembangunan) seperti dikemukakan, akan tetapi, lebih bersifat program pembangunan fisik. Meskipun telah dilakukan program pemberdayaan, tetapi dalam implemtasi dan keberlanjutan program masih memerlukan perhatian secara sungguh-sungguh, karena reaktif belum terjadi transfer daya dan proses belajar sosial kepada pihak *powerless*. Disamping itu, tidak kalah penting adalah pendampingan secara internal komunitas (dari unsur masyarakat) khususnya bagi program pemberdayaan, karena hasilnya belum seperti diharapkan.

Konsep model pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal berbasis aset komunitas tersebut, terlihat pada gambar berikut:

2.4.1 Kerangka Model



2.4.2 Langkah-langkah

Bertolak dari kerangka model tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi kualitas hidup masyarakat

Yaitu mengidentifikasi hal-hal yang dianggap paling merisaukan dan perlu diprioritaskan penanganannya. Dalam identifikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain: wawancara dengan berbagai lapisan masyarakat, diskusi kelompok. Disamping itu juga dimungkinkan memanfaatkan data sekunder, seperti monografi desa dan berbagai dokumen lainnya yang dianggap relevan. Selanjutnya, kondisi kualitas hidup masyarakat tersebut perlu diformulasikan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART).

Contoh:

- Sebanyak 30% dari Balita di Desa “A” menderita gizi buru pada akhir 2007;
- Sebanyak 1500 dari 3000 keluarga di Desa “B” adalah fakir miskin pada akhir 2007.

2. Identifikasi faktor manusia dan sosial

Yaitu mengidentifikasi faktor penyebab yang berhubungan dengan modal manusia dan modal sosial. Terkait itu, yang perlu dilakukan adalah:

- a) Mengidentifikasi faktor prilaku dan gaya hidup komunitas sasaran, yaitu tindakan komunitas sasaran yang merupakan cerminan kemampuan dan keterampilan.
Contoh: Sekitar 80% keluarga miskin di Desa “C” tidak tamat SMP pada akhir 2000;
- b) Mengidentifikasi faktor predisposisi, yaitu sesuatu yang muncul sebelum prilaku terjadi dan menjadi landasan motivasional dan rasional terhadap prilaku yang dilakukan suatu komunitas.

Contoh:

Sekitar 90% KK miskin di Desa “D” pada akhir 2000 masih berpandangan bahwa anak-anaknya cukup bisa baca tulis saja (SD), sehingga tidak perlu sekolah yang lebih tinggi;

- c) Merumuskan faktor penguat yang menyebabkan munculnya perilaku dan gaya hidup yang mendorong berkembangnya budaya kemiskinan di suatu komunitas.

Contoh:

Lebih dari 80% petugas yang berinteraksi dengan masyarakat, hingga pertengahan 2000, lebih memfokuskan pada pembangunan fisik dibandingkan dengan membentuk cara pandang masyarakat yang mau berfikir tentang pentingnya menabung;

- d) Merumuskan modal sosial yang terkait dengan ketiga faktor sebelumnya.

Contoh:

Adanya keyakinan dari masyarakat, bahwa pemilik toko/warung yang ada di desanya akan memberikan hutangan, sehingga warga miskin tetap dapat berbelanja.

3. Identifikasi faktor nonmanusia

Yaitu mengidentifikasi faktor-faktor (modal) nonmanusia yang mempengaruhi kualitas hidup suatu masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa faktor-faktor nonmanusia tersebut bukanlah faktor tunggal, tetapi merupakan interaksi diantara beberapa *asset* komunitas. Terkait faktor manusia dan sosial sebelumnya, dapat dirumuskan:

- a. Modal finansial, misalnya: Lebih 80% warga miskin, hingga akhir 2005, masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha;
- b. Modal teknologi, misalnya: Lebih 80% warga miskin yang bekerja di sektor

pertanian, hingga akhir 2005, masih merupakan petani tradisional, dan belum mengenal teknologi;

- c. Modal lingkungan, misalnya: Hingga akhir 2005, lebih dari 75% areal pertanian yang ada, kurang baik untuk tanaman palawija;
- d. Modal fisik, misalnya: Hingga akhir 2005, lebih dari 70% jalan di komunitas “A” merupakan tanah merah dan jalan berlumpur, dan tidak ada fasilitas (gedung) pendidikan (SD).

4. Identifikasi regulasi, kebijakan, dan program terkait

Yang tidak kalah penting, setelah mengidentifikasi faktor manusia dan sosial, dan faktor nonmanusia adalah mengidentifikasi faktor regulasi, kebijakan, program/ kegiatan yang pernah dilaksanakan. Boleh jadi, program dan kegiatan yang dilakukan justru menimbulkan permasalahan bagi *asset-asset* komunitas tersebut. Terkait dengan kemiskinan warga, misalnya: Hingga akhir 2005, lebih dari 80% program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah lebih terfokus pada pembangunan fisik.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo, tidak terkategori (lagi) desa tertinggal dari sisi ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar warganya (jalan desa, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan). Namun demikian, dari sisi kualitas kehidupan warganya, khususnya pemberdayaan ekonomi-sosial, masih memerlukan perhatian secara sungguh-sungguh dari berbagai pihak terkait. Desa Jambu dan Desa Engkangin di wilayah Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak termasuk dalam kategori desa tertinggal. Dari sisi geografis, terpencil dan berada di daerah

aliran sungai (DAS), fasilitas kebutuhan dasar warganya (jalan desa, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan) yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan secara komprehensif.

Dari sisi sumberdaya/modal/*asset* fisik (infrastruktur: pendidikan, kesehatan, ekonomi) finansial, teknologi, dan manusia khususnya di Desa Jambu dan Desa Engkangin relatif terbatas. Demikian halnya di Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo, kecuali modal fisik yang relatif tersedia. Namun demikian, di empat desa tersebut, dari sisi ekonomi cukup memberikan harapan karena modal lingkungan dan modal sosial, potensial untuk dikembangkan.

Permasalahan sosial menonjol di empat desa tersebut, seperti di desa dan daerah lain di Indonesia adalah masalah kemiskinan penduduk. Kondisi itu berimplikasi pada muncul dan kompleksnya pelbagai permasalahan (kesejahteraan) sosial, seperti: fakir miskin, rumah tidak layak huni, lanjut usia (terlantar), remaja putus sekolah, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Disamping itu, juga mabuk-mabukan dikalangan pemuda, disamping judi khususnya di Desa Jambu dan Desa Engkangin (Kabupaten Landak, Kalimantan Barat).

Telah banyak di laksanakan program pembangunan di empat desa tersebut, khususnya yang bersifat fisik dan bantuan sosial, meskipun juga telah dilakukan upaya pemberdayaan. Namun demikian, dari sisi keberhasilan (fungsionalitasnya bagi masyarakat), keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan tersebut masih perlu perhatian sungguh-sungguh.

3.2 Saran

3.2.1 Kementerian Sosial:

- Program penyuluhan sosial khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang

sumber-sumber kesejahteraan sosial yang bisa diakses warga; serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.

- Program pemberdayaan masyarakat miskin dan wanita rawan sosial ekonomi maupun perbaikan rumah tidak layak huni.
- Program Keluarga Harapan (PKH) bagi wanita hamil dan mempunyai anak usia sekolah
- Program Jaminan Sosial (Lanjut Usia, dan Penyandang Cacat, dan pekerja sektor informal).

3.2.2 Instansi terkait (Pusat, daerah):

Desa Sendangmulyo & Desa Mlatirejo:

- Pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di pinggiran hutan tersebut penting dilakukan agar tetap *'bersahabat'* dengan hutan, yang pada gilirannya hutan berkontribusi bagi kesejahteraan warga masyarakat di sekitarnya.
- Program pengembangan usaha pertanian, antara lain: bantuan bibit, dan bimbingan mulai dari penyiapan lahan, penanaman, perawatan sampai dengan memanen hasil dan pemasaran. Terkait itu, pada setiap kegiatan perlu dipersiapkan tenaga pembimbing dan pendamping masyarakat.
- Teknologi tepat guna untuk memanfaatkan kotoran binatang ternak dan pengawetan buah (mangga, pisang).

Desa Jambu & Desa Engkangin

- Pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan;
- Program pengembangan usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan,

BIBLIOGRAFI

- Anonim. 2001. *Kabupaten Landak dalam Angka*. BPS Kabupaten Landak.
- Aritasius & Syaifullah, M. 2004. *Kabupaten Landak dalam Profil Daerah Kabupaten dan Kota* (F Harianto Santsos, Editor), Jilid 4, hal 499 - 507.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas, dari Pemikiran menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP-UI Press.
- 2008. *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bappenas. 2006. *Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal*. Dit. Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
- BPS Kabupaten Landak. 2008. *Landak Dalam Angka*.
- BPS Kabupaten Rembang. 2009. *Rembang Dalam Angka 2008/2009*.
- Bappeda Kab. Rembang & Koordinator Statistik Kecamatan Bulu. 2008. *Kecamatan Bulu Dalam Angka 2008*.
- Charles Zastrow. 2008. *Introduction to Social Work & Social Welfare, Empowering People*, Thomson Higher Education, 10 Davis Drive, Belmont, USA. 9th edition.
- Dasgupta, Partha and Ismail Serageldin. 2000. *Social Capital: A Multifaced Perspective*. Washington D.C. The Wolrd Bank.
- Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. 2008. *Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2008 – 2013*.
- Desa Sendangmulyo. 2008. *Daftar Isian Potensi Desa*
- Desa Mlatirejo. 2008. *Daftar Isian Potensi Desa*
- Fukuyama, Francis. 2000. *Social Capital dalam Lawrence E Harisson dan Samuel Hutington (eds) Culture Matters, How Vallues Shape Human Progress*. New York: Basic Book.
- Grottaert, Cristian. 1999. *Social Capital household Welfare and Poverty in Indonesia, Local Level Institution Working*. No 6, The Wolrd Bank Social Development Family Environment and Socially Sustainable Development Network.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Kabupaten Rembang. 2006. *Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal 2007 – 2009*.
- Kementerian Sosial R.I. 2010. *Rencana Strategis 2010 - 2014*
- *Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 06B/HUK/2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Lima Puluh Kabupaten Tertinggal*.
- 2010. *Bangkit, Media Informasi dan Komunikasi Pembangunan. Edisi2/ 2010*.
- Media Indonesia. 20 Mei 2010. *Kebijakan PDT Mendorong Kebangkitan Daerah Tertinggal*.

- Miles, Mateehew B., Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. Penerbit: UI-PRESS.
- Payne, Malcolm. 1997. *Modern Social Work Theory*. Second edition. London: Macmillan Press Ltd.
- Pranarka, A.M.W. & Moeljarto, Vindyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, konsep, dan implementasi*, Jakarta: Centre for strategic and international studies (CSIS).
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- World Bank. 1995,1999. *World Development Report, Washington DC* (beberapa tahun terbitan).
<http://www.gp-ansor.org/opini.2006> (20/3/2009).
<http://www.mudrajad.com> (20/3/2009).